

# 2022

Minggu ke-3 Februari  
(10 s.d 17 Februari 2022)

# Isu Sepekan

Bidang Ekuinbang, Komisi XI



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## IMPLEMENTASI QRIS DALAM MENGAKSELERASI TRANSFORMASI PEMBAYARAN DIGITAL

Izzaty

Peneliti Muda  
izzaty@dpr.go.id

### Isu dan Permasalahan

Transformasi digitalisasi pembayaran merupakan salah satu agenda utama dari enam agenda prioritas Finance Track Presidensi G20 yang berlangsung tanggal 15 s.d. 18 Februari 2022, dimana presidensi G20 mengusung slogan "*Recover Together, Recover Stronger*". Selaras dengan prioritas tersebut, Gubernur BI menekankan pentingnya pembayaran digital dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat.

Visi digitalisasi sistem pembayaran sejalan dengan *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025* diantaranya mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital, mendukung digitalisasi perbankan, mengintegrasikan antara bank dan teknologi finansial, menyeimbangkan inovasi dan mitigasi risiko, dan kerja sama lintas negara.

Sistem pembayaran di Indonesia sudah mengalami perkembangan monumental. Pertama, per 1 Januari 2018 Bank Indonesia (BI) menginisiasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Kedua, sistem pembayaran kembali memasuki babak baru menyusul BI berinovasi dengan QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*) yang efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2020. Metode pembayaran nontunai yang berbasis pada kode QR ini berlaku untuk semua aplikasi pembayaran uang elektronik *server based*, dompet elektronik, dan *mobile banking*.

Volume transaksi QRIS hingga November 2021 berada pada kisaran 42 juta transaksi dengan nominal lebih dari Rp3 triliun, meningkat pesat bila dibandingkan volume transaksi QRIS hingga Maret 2020 yang hanya 5 juta transaksi dengan nominal dibawah Rp500 miliar. Hal ini tidak terlepas dari upaya Bank Indonesia dalam memperluas penggunaan QRIS melalui kemudahan dan insentif contohnya memperpanjang *Merchant Discount Rate (MDR)* QRIS 0% bagi usaha mikro dan menaikkan limit transaksi QRIS dari Rp2 juta per transaksi menjadi Rp5 juta per transaksi.

Pengembangan QRIS terbagi atas tiga tahapan dimulai dari lingkup domestik yang sudah dilakukan. Saat ini BI tengah memasuki tahapan kedua, yaitu penggunaan QRIS *cross border*, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Tahap ketiga, berupa kerjasama QRIS yang akan dilakukan di luar kawasan ASEAN.

BI perlu mendorong sejumlah lembaga internasional menyusun konsep *new Data Gaps Initiative (DGI)*. Hal ini sebagai tindak lanjut program menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20. Konsep *new DGI* mencakup empat area yaitu perubahan iklim, informasi distribusi rumah tangga, *fintech*, dan data inklusi keuangan, serta akses ke sumber data pribadi dan data administrasi.

Tantangan penerapan QRIS *cross border* yang dihadapi adalah kesenjangan infrastruktur digital, kapabilitas digital, masyarakat yang masih menggunakan uang tunai dan belum punya rekening bank. Untuk menghadapi tantangan tersebut memerlukan kolaborasi BI, pemerintah, dan seluruh pelaku industri baik di tingkat pusat maupun daerah.

## Atensi DPR

DPR RI dalam hal ini Komisi XI sebagai mitra pemerintah, terus mengingatkan BI dan OJK dalam Rapat Kerja, agar mitigasi risiko dan pengawasan implementasi QRIS dilakukan secara pruden. DPR mendorong BI untuk segera berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk merampungkan *new big data initiative* dan mengadopsinya sebagai dasar pengambilan kebijakan yang efektif.

DPR RI dalam hal ini Komisi XI dan Komisi VI memberikan attensi melalui fungsi konstitusionalnya untuk memastikan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dan konsumen. DPR perlu memastikan agar pricing QRIS tidak menghentikan langkah transformasi sistem pembayaran digital, dan juga memastikan BI merancang kebijakan yang mumpuni jika struktur pasar jasa pembayaran nontunai di Indonesia akan berproses menuju ke oligopoli.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 14 dan 15 Februari 2022;  
*cnn.com*, 16 Februari 2022;  
*Media Indonesia*, 14 dan 16 Februari 2022;  
Raker Komisi XI, 27 Januari 2022.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://puslit.dpr.go.id>

EDITOR

LAYOUTER



@puslitbkd\_official

Polhukam  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekuinbang  
Mandala Harefa  
Sri Nurhayati Q.  
Riyadi Santoso  
Rasbin  
Edmira Rivani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Kesra  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikah P.S.  
Fieka Nurul A.